



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 900.1.3.5/ 27 /BUP-LK/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KESATU : Menunjuk Pejabat Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 900.1.3.5/ 27 /BUP-LK/1/2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN	KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN KEGIATAN	
1	Drs. Muftil Wahyudi NIP. 19731107 199303 1 002	Kepala Bagian Pemerintahan	- Penataan Administrasi Pemerintahan - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri - Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Sekretariat Daerah
2	Maradona, SH NIP.19790828 200901 1 010	Kepala Bagian Hukum	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Fasilitasi Bantuan Hukum - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Sekretariat Daerah
3	Gusni Yenti, SE NIP. 197308221998032000	Kepala Bagian Organisasi	- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
4	Indra Mangun Sakti, SE. MM NIP. 19681218 200212 1 002	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah
5	Oka Prasetya Lubis, ST NIP. 19791016 200801 1 004	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pegelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
6	Destamal, ST, M.Eng NIP. 19721204 200212 1 005	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil - Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan - Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekretariat Daerah
7	Syukraldi Arlen, S.Pd NIP.19720126 199303 1 003	Kabag Kesejahteraan Rakyat	- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Sekretariat Daerah
8	Muhammad Abrar, S.Sos NIP. 19731103 199303 1 001	Kepala Bagian Umum	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat Daerah

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
			DENGAN KEGIATAN	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
9	Dra. Lina Medona, MM NIP. 19690515 199308 2 001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Sekretariat Daerah
10	Andri Yasmen, S.Sos NIP. 197209201992021001	Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	- Fasilitasi Keprotokolan - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan - Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Sekretariat Daerah
11	Bobby Irwanto, SE NIP.19710921 200312 1 004	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KETERANGAN
		STRUKTURAL	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
			DENGAN KEGIATAN	
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan - Pengelolaan Dana Darurat dan Medesak - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah	
12	Yanti Susilowati, STR. Keb NIP.19701025 199012 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Suliki	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
13	drg. Meilita Wise Utami NIP. 19750513 200502 2 003	Kepala UPTD Puskesmas Mungo	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
14	Ns. Tuti Dwi Putri, S Kep NIP.19791003 200604 2 016	Kepala UPTD Puskesmas Pangkalan	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
15	dr. Febriandi NIP. 19810217 201101 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Tanjung Pati	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
16	dr. Silvia Rosja NIP. 19840409 201407 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Situjuh	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
17	Dina Lucia Vermana, S.ST NIP.19771120 200501 2 007	Kepala UPTD Puskesmas Piladang	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
18	Ns. Masril, S.Kep NIP. 19740605 199303 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Batu Hampar	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
19	Tri Mujianti, S.ST NIP. 19660421 199003 2 005	Kepala UPTD Puskesmas Taram	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
20	Ermalifia Nora, S.Tr.Keb NIP. 19731104 200212 2 003	Kepala UPTD Puskesmas Halaban	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
21	Lely Ekarita, S.ST NIP. 19730116 199303 2 004	Kepala UPTD Puskesmas Dangung-Dangung	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
22	drg. YULIA ROZI PERWITA NIP. 19711007 200212 2 002	Kepala UPTD Puskesmas Koto Baru Simalanggang	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
23	dr. Yobi Syumarta NIP. 19910321 201902 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Padang Kandis	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
24	Yuflida, SP NIP. 19670930 198803 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Mungka	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

NO	NAMA / NIP	STRUKTURAL	JABATAN	KETERANGAN
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN KEGIATAN	
25	Ns. Yon Apriyanto, S.Kep NIP. 19740606 200604 1 012	Kepala UPTD Puskesmas Maek	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
26	Reni Hestuti, S.ST NIP. 19720629 199202 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Koto Tinggi	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
27	Dewi Erizandi, S.ST NIP. 19771217 200604 2 007	Kepala UPTD Puskesmas Banja Loweh	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
28	dr. Hadi Oktafiano NIP. 19921024 201902 1 001	Kepala UPTD Puskesmas Baruh Gunung	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
29	dr. Putri Nilam Sari Nazir NIP. 19880715 201902 2 003	Kepala UPTD Puskesmas Muaro Paiti	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
30	dr. Dikky Nazir NIP. 19760519 200604 1 008	Kepala UPTD Puskesmas Rimbo Data	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
31	Imrizal, SKM NIP. 19690917 199001 1 001	Kepala Puskesmas Gunuang Malintang	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
32	Parti Yasmi, S.ST NIP. 19710710 199012 2 001	Kepala UPTD Puskesmas Pakan Rabaa	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
33	drg. Nadya Pratiwi Utami NIP. 19930727 201902 2 004	Plt. Kepala UPTD Puskesmas Sialang	- Peningkatan Pelayanan BLUD - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

